

Persepsi Mahasiswa Pada Citra Institusi Kepolisian (Studi Kasus Ferdy Sambo)

Alifia Priyayitha Hapsari, Surendra Prayoga, Yasmin Labibah
Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
alifia.22058@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The institution of Indonesian National Police is currently receiving a lot of spotlight due to the large number of individuals who have committed disgraceful acts. It is no longer a public secret that the 'depravity' is being carried out by the police. Moreover, the Ferdy Sambo case has even become a topic of discussion for netizens. The case of Ferdy Sambo was previously known as the case of Brigadier J. However, as time went on, this case changed its context after the truth was slowly revealed by investigators. Starting from the narration of 'Police Shoot Police' to 'Police Murder by Police' this creates many perceptions from the public about Polri. This makes the image of the police increasingly tarnished so that public confidence in this institution decreases. The purpose of this study was to determine student perceptions of the image of the police institution in the case of the murder of Brigadier J by Ferdy Sambo. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The result of this research is that the police are still needed as the authorities and security institutions in Indonesia. However, with their current image, students demand improvements internally, externally, and even structurally. Students need proof that the police have changed.

Keywords: *Indonesian National Police, crime; Brigadir J; Sambo; College Student Perceptions*

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sedang mendapat banyak sorotan dikarenakan banyaknya oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi 'kebobrokan' yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Terlebih lagi dengan adanya kasus Ferdy Sambo ini malah menjadi bahan perbincangan warganet. Kasus Ferdy Sambo ini sebelumnya terkenal dengan sebutan kasus Brigadir J. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, kasus ini menjadi menjadi berubah konteks setelah kebenarannya perlahan diungkap oleh penyidik. Berawal dari narasi 'Polisi Tembak Polisi' sampai 'Pembunuhan Polisi oleh Polisi' ini menimbulkan banyaknya persepsi dari masyarakat tentang Polri. Hal ini membuat citra kepolisian semakin tercoreng sehingga kepercayaan masyarakat kepada institusi ini menurun. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui persepsi mahasiswa pada citra institusi kepolisian kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Jenis penelitian yang digunakan adalah feminologi dengan pendekatan kualitatif, kemudian dijabarkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menurunnya kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga kepolisan, tetapi mereka menyadari pentingnya peran polisi sebagai lembaga penegak hukum sehingga tetap dibutuhkan di Indonesia. Namun dengan citranya saat ini, mahasiswa menuntut pembenahan secara internal, eksternal, bahkan struktural. Mahasiswa butuh pembuktian bahwa polisi sudah benar-benar berubah.

Kata kunci: *Polri; kriminal; Brigadir J; Sambo; Persepsi Mahasiswa*

1. Pendahuluan

Warganet ramai membicarakan soal 'kepercayaan' terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) beberapa bulan ini. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya oknum polisi yang banyak melakukan pelanggaran hukum, padahal mereka merupakan penegak hukum. Terbunuhnya Brigadir Yosua Hutabarat oleh atasannya sendiri, yakni Irjen Ferdy Sambo membuat heboh masyarakat Indonesia sebab terkuaknya tindak kriminal seorang tokoh masyarakat Indonesia, apalagi kasus ini berasal dari polisi, yang mana merupakan lembaga hukum dan berperan sebagai garda terdepan melindungi keamanan. Penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa sebagai masyarakat yang terpelajar dan telah mengawal berjalannya kasus Ferdy Sambo.

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh dari kasus terbunuhnya Brigadir J oleh Ferdy Sambo terhadap persepsi masyarakat, khususnya mahasiswa. Penulis ingin mengetahui sejauh mana mahasiswa mengikuti kasus Ferdy Sambo, respon masyarakat terhadap pemberitaan kasus Ferdy Sambo, serta solusi yang ditawarkan masyarakat terkait kegagalan kepolisian dalam menjalankan tanggungjawabnya.

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi analisis kasus Irjen Ferdy Sambo, mengetahui akan dasar-dasar hukum yang dapat dikenakan pada kasus Ferdy Sambo, analisis persepsi mahasiswa terkait kasus Ferdy Sambo dan memahami hal-hal yang menjadi latar belakang dari adanya persepsi tersebut.

2. Metode Penelitian

Jenis studi yang digunakan untuk mengumpulkan data-data pada jurnal ilmiah ini merupakan feminologi dengan pendekatan kualitatif. Menurut Krisyantono, penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi[1]. Pengumpulan data dikumpulkan secara kualitatif, yang mana didapat dari penyebaran formulir yang dibuat dari *Google Form* kemudian diedarkan secara *online* memanfaatkan media sosial WhatsApp dan Instagram. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur pendukung, yakni buku, jurnal dan internet.

Informan penelitian didapatkan dengan *sampling non-probabilitas convenience sampling*, yakni kemauan responden secara sukarela untuk menjadi informan pada penelitian ini. Formulir yang disebarkan berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga informan dapat menuliskan opini atau sudut pandangannya tanpa dibatasi skala tertentu. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Data-data pendukung juga dituliskan dalam bentuk narasi.

Target penelitian merupakan mahasiswa, khususnya yang paham akan hukum dan mengikuti kasus terbunuhnya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) oleh atasannya sendiri yang salah seorang pejabat tertinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Kadiv Propam Polri, yakni Irjen Ferdy Sambo. Tujuan dari digunakannya metode penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, pengembangan teori, mendeskripsikan sebuah realitas, serta kompleksitas sosial yang terdapat pada kasus Ferdy Sambo.

3. Hasil dan Pembahasan

Didapatkan delapan belas informan yang memenuhi kriteria untuk pengolahan data pada penelitian ini. Informan dari penelitian ini merupakan mahasiswa, mayoritas berasal dari program studi hukum. Informan berusia delapan belas hingga sembilan belas tahun. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kuisioner yang telah dibagikan, didapat hasil dan pembahasan sebagai berikut:

1) Menurunnya kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga kepolisian

Menurut Bok, Kramer dan Tylor, kepercayaan adalah suatu hubungan antarpribadi dan konsep organisasi yang rumit, tetapi saling berhubungan[2]. Dari hasil pengambilan data, didapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya citra kepolisian sudah buruk dalam perspektif beberapa mahasiswa, bahkan sebelum munculnya kasus pembunuhan oleh Ferdy Sambo. Sebagaimana informan menjelaskan:

“Banyak pejabat di kepolisian yang menyalahgunakan wewenangnya guna melakukan tindak kejahatan. Beredar cerita bahwa beberapa dari mereka melakukan korupsi dari kasus yang ditangani. Selain itu, mereka juga mengabaikan laporan warga.” (HN).

Sebelum kasus pembunuhan Brigadir J, telah beredar cerita di masyarakat mengenai kinerja polisi yang dinilai kurang baik, mayoritas informan menekankan pada kasus pungli. Hal ini menandakan kurangnya transparansi polisi ketika penanganan kasus sehingga timbulnya persepsi sendiri di kalangan masyarakat. Dampak dari sikap tersebut adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Sebagaimana informan menjelaskan:

“Instansi yang memiliki citra cukup buruk di mata masyarakat zaman sekarang dan sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat sejak lama. Namun, hingga saat ini saya belum menemukan upaya yang berhasil mengembalikan kepercayaan itu. Citra kepolisian setelah kasus Ferdy Sambo di mata saya menjadi lebih buruk dari sebelumnya, terutama ketika ditemukan keganjilan dalam perkembangan kasus Ferdy Sambo.” (S).

Selain kurangnya transparansi dalam penanganan kasus, kinerja polisi juga dinilai lalai. Sebagaimana informan menjelaskan:

“Menurut saya sebelum adanya kasus tersebut, ada kalanya kepolisian kurang tanggap dalam menangani suatu kasus.” (JS).

Kasus Ferdy Sambo membuat citra institusi kepolisian semakin buruk dalam perspektif mahasiswa sebab dianggap sebagai hal yang biadab dan tidak sepatutnya dilakukan oleh lembaga penegak hukum itu sendiri. Kejahatan Irjen Ferdy Sambo kepada Brigadir J tentu saja tidak merepresentasikan visi dan misi Polri, yang mana menyatakan bahwa akan terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif.

Menurut Poerwadarminta, integritas merupakan kepaduan, kelengkapan dan kejujuran[3]. Berjalannya penyelidikan kasus Ferdy Sambo dinilai ditutup-tutupi faktanya sehingga terkesan berbelit-belit dan tidak kunjung menemukan titik terang. Sebagaimana informan menjelaskan:

“Kasus ini tidak kunjung selesai, tidak ada harapan positif untuk pihak yang dirugikan, dan terlalu berputar-putar tidak ada kejelasan.” (K).

Mahasiswa merasakan kejanggalan yang ada pada Kasus Ferdy Sambo bukan hanya dari rangkaian peristiwa yang dijabarkan di pengadilan, tetapi juga pada awak media. Wartawan dinilai memberitakan hal yang sama secara berulang-ulang, padahal mahasiswa menantikan pemberitaan selesainya kasus ini. Sebagaimana informan menjelaskan:

“Saya merasa ada kejanggalan di kasus tersebut, entah dari media yang menutupi atau memang media belum menemukan detail kasus Ferdy Sambo. Saya rasa melihat berita tentang sambo hanya seperti berita yang diulang-ulang dan masih belum menemukan titik temu inti masalahnya.” (RA).

Mahasiswa masih menantikan terungkapnya motif Ferdy Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J, tetapi berjalannya penyelesaian kasus dinilai lamban dan tidak kunjung selesai. Sebagaimana informan menjelaskan:

“Ternyata kepolisian yang seharusnya bertugas memberikan perlindungan pada rakyat, kasus ini malah sebaliknya. Apalagi pelaku memiliki pangkat yang besar. Dan sampai saat ini, motif pelaku membunuh bawahannya masih belum diketahui.” (JS).

Fenomena ini menciptakan persepsi kepada mahasiswa bahwa adanya unsur kesengajaan. Persoalan yang ditakutkan adalah tertimbunnya kasus Ferdy Sambo dengan berita-berita lain sehingga orang-orang lupa atau malas mengawal kasus ini lagi.

2) Kesadaran terhadap pelanggaran HAM

Menurut Daniel Lev, konsep HAM bersifat universal dan tidak mengakui makna atau penafsiran yang hanya bercirikan kekhususan lokal. Banyak pemerintah tidak menyukai ini, sebab konsep yang bersifat universal akan membatasi kekuasaan pemerintah. Sedangkan menurut Yozo Yokota, HAM merupakan kedaulatan yang sungguh ditujukan bagi setiap individu, tidak memandang ras, suku, agama dan kebudayaan tertentu [4].

Ferdy Sambo telah menjalankan aksi pelanggaran HAM berupa *extrajudicial killing*, yakni pembunuhan hidup seseorang di luar proses hukum. Mahasiswa semakin sadar betapa bobroknnya institusi kepolisian sebab sebagai lembaga penegak hukum, polisi malah menjadi pelaku dari tindak kriminal itu sendiri, bahkan sampai membunuh sesama anggota. Sebagaimana informan menjelaskan:

“Saya rasa kasus kriminal dan pelanggaran HAM berat seperti ini cukup rumit dan tidak sepatutnya berasal dari seorang aparat penegak hukum.” (S).

3) Pemberian label “Oknum” pada polisi yang berperilaku menyimpang

Menurut Hermanto dan Winarno, *Labelling* merupakan identitas yang diperoleh suatu individu dari kelompok berlandaskan karakteristik yang dianggap inferior bagi suatu kelompok masyarakat. *Labelling* condong ditujukan kepada orang yang berperilaku menyimpang dan tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Seseorang yang memperoleh label tersebut biasanya akan mendapati perubahan berperilaku seperti label yang didapatinya[5].

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oknum merupakan orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik). Oknum sendiri berarti perseorangan sehingga dalam

kasus ini, tidak bisa disamaratakan bahwa semua polisi memiliki sifat yang sama. Maka dari itu, pemilihan kata 'Oknum' merupakan ungkapan yang tepat. Sebagaimana informan menjelaskan:

"Saya menganggap polisi itu sebagai institusi yang mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat. Namun, memang ada beberapa oknum yang menyalahgunakan jabatannya untuk mengambil keuntungan sendiri seperti pungli penilangan. Serta berdasarkan pengetahuan saya, ada juga polisi mengambil keuntungan lebih dari pejabat negara seperti peringanan kasus korupsi, yang mana saya rasa di situ pasti ada tindak suap." (RA).

Banyaknya pemberitaan tentang kebobrokan polisi yang menempatkan kata 'Oknum' pada bagian judul, membentuk pemikiran pada mahasiswa bahwa sebenarnya perilaku polisi memang banyak yang buruk, tetapi terlindung di balik kata 'Oknum'. Sebagaimana informan menjelaskan:

"Karena menyangkut instansi negara yang sangat penting posisinya sekalipun itu 'oknum', tetap saja tidak menutup kemungkinan untuk lebih banyak lagi 'oknum-oknum' lainnya. Betapa banyaknya kasus penyimpangan polisi, yang mana jika dikumpulkan seakan-akan sudah bisa membuat suatu badan perkumpulan sendiri." (Y).

4) Dukungan penegakan hukum pada pelaku kejahatan

Kekuasaan yang tidak teratur akan berpengaruh pada perubahan karakter yang sewenang-wenang dan berpunca pada penyimpangan. Penyalahgunaan jabatan atau *abuse of power* oleh Irjen Ferdy Sambo guna melancarkan aksinya dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dapat digolongkan sebagai perbuatan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 340 KUHP, "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."

Apalagi Irjen Ferdy Sambo bekerja sama dengan penembak nomor satu di resimen satu pasukan pelopor di jajaran Korps Brimob, yakni Bharada Richard Elizer (Bharada E). Berdasarkan kronologi kasus yang telah diberitakan, Bharada E turut membunuh Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Bharada E diberikan amplop yang berisi uang dan iPhone 13 Pro Max. Hal serupa juga didapat oleh Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di rumah pribadi Ferdy Sambo, tepatnya Jl. Saguling 3. Pemberian iPhone ini dianggap sebagai ganti gawai Bharada E sebelumnya yang dilenyapkan guna menghilangkan jejak pembunuhan Brigadir J. Bripka Ricky Rizal (Bripka RR) dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam perkara ini sebab tidak melaporkan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo. Tindakan ini dapat dikenakan Pasal 56 KUHP, "Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- a) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- b) Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu."

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, mahasiswa setuju untuk mengikuti kasus Ferdy Sambo sampai akhir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan:

"Saya akan mengikuti kasus Ferdy Sambo sampai akhir, sampai pengadilan memberikan hukuman yang sangat berat kepadanya atas kasus pembunuhan yang telah dilakukannya." (HN).

Mahasiswa akan tetap mengikuti pemberitaan jalannya kasus Pembunuhan Brigadir J dengan harapan Ferdy Sambo mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh informan K. Sebagaimana informan menjelaskani:

"Saya ingin mengetahui apa hukuman pidana yang akan beliau dapat dan apakah bisa setimpal dengan tindak pidana yang beliau lakukan." (K).

Pendapat di atas dilatarbelakangi oleh masih adanya keyakinan pada kuatnya supremasi hukum di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada alasan bagi Ferdy Sambo diperlakukan secara khusus hanya karena mantan perwira tinggi di Polri. Sebagaimana informan menjelaskan:

“Semua orang di mata hukum itu sama.” (A).

4. Kesimpulan

Setelah meneliti tentang persepsi mahasiswa terhadap institusi kepolisian setelah kasus Ferdy Sambo, dihasilkan adanya kekecewaan terhadap lembaga kepolisian karena mempertanyakan kenapa pelanggaran ini bisa terjadi dan dilakukan oleh irjen yang menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi. Kepercayaan mahasiswa terhadap kepolisian menurun sebab polisi dinilai tidak menjaga amanah rakyat. Hal ini dikarenakan banyaknya penyimpangan yang dilakukan polisi saat melakukan tugasnya. Selain itu, banyaknya cerita masyarakat dari mulut ke mulut atas ketidakpuasannya terhadap kinerja polisi sebab kurangnya transparansi dalam pelayanan masyarakat. Setelah kasus Ferdy Sambo, mayoritas dari informan memberi label buruk kepada lembaga kepolisian. Meskipun begitu, mahasiswa berharap Ferdy Sambo dapat dihukum dengan seadil-adilnya agar dia jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Kasus Ferdy Sambo memberikan dampak kepada mahasiswa seperti munculnya rasa takut terhadap kepolisian, hilangnya rasa hormat kepada kepolisian dan berpikir bahwa semua polisi memiliki perilaku buruk seperti Ferdy Sambo. Banyaknya permasalahan yang terjadi di kepolisian terhadap masyarakat seperti maraknya pungli, mengabaikan laporan warga, pilih-pilih dalam pelayanan ini merupakan beberapa penyebab mengapa mahasiswa memandang buruk citra polisi. Maka dari itu, solusi bagi lembaga kepolisian adalah dapat dimulai dengan selalu ada untuk masyarakat dengan siap melayani laporan warga 1x24 jam, bertanggung jawab akan tugas yang diemban, mengevaluasi kinerja para anggota agar tumbuhnya transparansi kepada masyarakat sehingga terwujudnya keadilan dan kejujuran dalam bertugas. Selain itu, peningkatan kinerja polisi juga dapat dicapai dengan menambah waktu pendidikan bagi calon polisi.

Walaupun setelah kasus ini kepercayaan masyarakat menurun, kepolisian tetap dibutuhkan sebagai lembaga penegak hukum guna mengayomi dan menjaga masyarakat. Maka dari itu, permasalahan yang ada harus segera dibenahi secara tuntas, baik di dalam kepolisian sekalipun. Nemun meski kasus ini mengecewakan, tidak seharusnya masyarakat melabeli seluruh kepolisian dengan buruk hanya karena satu oknum saja, mengingat sulitnya peralihan kepolisian menjadi lembaga lain.

Bersama ini, tim penulis mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak Himpunan Mahasiswa Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya melalui program Seminar Nasional 2022.

Daftar Pustaka

- [1] F. Ilmu, S. Dan, I. Politik, U. Muhammadiyah, and S. Utara, “Opini Masyarakat Asahan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019,” *J. Pendidik.*, 2019.
- [2] Juanda Nawawi, “Membangun Kepercayaan dalam mewujudkan good governance,” *J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 1, p. 19, 2012.
- [3] . Sugiyarti, I. Sardi, and A. Mara, “Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kepercayaan (Trust) Di Kud Berdikari Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi,” *J. Ilm. Sosio-Ekonomika Bisnis*, vol. 18, no. 1, pp. 1–9, 2015, doi: 10.22437/jiseb.v18i1.2811.
- [4] D. G. S. Mangku, “Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya : Dalam Perspektif ASEAN,” *Media Komun. FIS*, vol. 12, no. 2, pp. 60–69, 2013.
- [5] A. Anggraeni, “Implementation Of Bibliotherapy To Increase Understanding Of Negative Labelling Of 7th D Grade Students In Junior High School 2 Dlanggu-Mojokerto,” *J. Bk Vol. 7, No. 3, 2017*, vol. 7, no. 3, pp. 256–265, 2017.